



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2011  
TENTANG  
AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;  
2. Sekretaris Kabinet;  
3. Jaksa Agung;  
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;  
6. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;  
7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;  
8. Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara;  
9. Para Gubernur;  
10. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi Tahun 2012, dengan merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012.

KEDUA ...

- KEDUA : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman pada strategi-strategi yang meliputi :
1. Strategi Pencegahan;
  2. Strategi Penegakan Hukum;
  3. Strategi Peraturan Perundang-Undangan;
  4. Strategi Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Korupsi;
  5. Strategi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi;
  6. Strategi Mekanisme Pelaporan.
- KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini :
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengoordinasikan Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di bidang politik, hukum, dan keamanan;
  2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di bidang ekonomi;
  3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di bidang kesejahteraan rakyat.
- KEEMPAT : Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan
- dan ...

dan Pengendalian Pembangunan, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

**KELIMA** : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, semua Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, wajib berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung.

**KEENAM** : Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan melakukan koordinasi Pemantauan dan Evaluasi kemajuan secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

**KETUJUH** : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Asisten Deputi Bidang  
Perancangan Perundang-undangan  
Bidang Politik, Hukum, dan  
Keamanan,

M. Rokib



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Terbaru  
tgl 28 Des '11

LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 17 TAHUN 2011

TANGGAL : 19 Desember 2011

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2012

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
STRATEGI PENCEGAHAN							
Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi							
1		Pelaksanaan penanganan perkara yang transparan dan akuntabel sesuai revisi Peraturan KaPolri No. 12 Tahun 2009	Terbangunnya sistem penanganan perkara berbasis TI dari Bareskrim Polri sampai dengan Ditreskrim Polda, Polres dan Polsek yang dapat diakses oleh masyarakat, dengan target 25% dari jumlah Polres dan Polsek yang ada pada saat ini	April 2012	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik dalam penanganan perkara pidana sesuai dengan Revisi Peraturan KaPolri No. 12 Tahun 2009 di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Sekjen Ombudsman RI
			Tersosialisasikannya sistem penanganan perkara berbasis TI kepada Polda, Polres, dan Polsek percontohan	Juni 2012			
			Terlaksananya sistem penanganan perkara yang dapat diakses oleh masyarakat secara terbatas pada Polda, Polres, Polsek percontohan	Juli 2012			

Persentase ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Persentase penanganan perkara yang terdokumentasikan dalam sistem penanganan perkara yang berbasis TI	Desember 2012			
2		Pelaksanaan transparansi, dan akuntabilitas layanan publik di lingkungan Kepolisian	Terpublikasinya informasi publik melalui <i>website</i> Polri dan papan pengumuman di seluruh Indonesia, antara lain terdiri dari: a. Profil Organisasi dan SDM, struktur organisasi dan tugas/fungsi unit, nama pejabat dan kontak pejabat yang dapat dihubungi b. Penegakan hukum, pelayanan publik dan penjagaan ketertiban, dan informasi wajib lainnya sesuai dengan ketentuan KIP	Juni 2012	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik sesuai tugas dan fungsi kepolisian	Kepolisian Negara Republik Indonesia	
3		Pelaksanaan pelayanan paspor yang cepat, mudah, transparan dan tepat waktu dan bebas dari pungutan liar	100% kantor imigrasi yang sudah dapat melayani pemberian paspor dalam waktu 4 (empat) hari setelah pengambilan foto pemohon dan bebas dari pungutan liar	Desember 2012	Pelayanan pembuatan paspor menjadi mudah, murah, cepat, transparan dan tepat waktu dari mulai proses awal sampai terbit paspor sehingga dapat meminimalisir terjadinya pungutan liar	Kementerian Hukum dan HAM	

Pelaksanaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4		Pelaksanaan administrasi hukum perdata dan administrasi badan hukum yang transparan dan akuntabel	Terpublikasinya Berita Negara (BN), tambahan Berita Negara (TBN) dan layanan permohonan badan hukum diumumkan secara tepat waktu melalui situs yang dapat diakses oleh masyarakat	Desember 2012	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Hukum dan HAM	
5		Penguatan pertukaran data perpajakan dan dokumen ekspor dan impor antara DJP dan DJBC	Terbangun dan termanfaatkannya sistem pertukaran data dokumen ekspor, impor dan perpajakan antara DJP dan DJBC dalam perhitungan bea cukai dan perpajakan.	Juli 2012	Penggunaan data ekspor impor yang sama ( <i>unified data</i> ) dalam perhitungan bea cukai dan pajak oleh DJP dan DJBC sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan DJP dan DJBC	Kementerian Keuangan	
6		Pelaksanaan <i>whistle blower system</i> pada Instansi pemerintah dalam proses pengadaan barang dan jasa	<ol style="list-style-type: none"><li>Jumlah K/L dan Pemda (Prov/Kab/Kota) yang memiliki <i>whistle blower system</i> dalam proses pengadaan barang dan jasa</li><li>Tersedianya <i>whistle blower system</i> yang dapat dimanfaatkan oleh K/L dan Pemda pada portal pengadaan nasional</li></ol>	April 2012	<ol style="list-style-type: none"><li>Peningkatan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada <i>whistle blower</i> dalam rangka pemberantasan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa</li><li>Mendorong pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan barang dan jasa</li></ol>	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Kementerian Dalam Negeri

Evaluasi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Evaluasi terhadap <i>whistle blower system</i> di K/L dan Pemda dalam proses pengadaan barang dan jasa	Desember 2012	Peningkatan efektivitas sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada <i>whistle blower</i> dalam rangka pemberantasan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa	LKPP	
7		Pelaksanaan <i>whistle blower system</i> di lingkungan DJBC yang terintegrasi dengan sistem di Kementerian Keuangan	Tertanganinya seluruh pengaduan <i>whistle blower</i> yang telah diverifikasi sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penerimaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat pada DJBC	Desember 2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada <i>whistle blower</i> dalam rangka pemberantasan korupsi di lingkungan DJBC</li> <li>2. Mendorong pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan di lingkungan DJBC</li> </ol>	Kementerian Keuangan	
8		Pelaksanaan pelayanan perizinan secara <i>online</i> dan keterbukaan informasi status perizinan	Tersedianya sistem pelayanan perizinan secara <i>online</i> yang dapat diakses oleh masyarakat	Juni 2012	Peningkatan kemudahan masyarakat dan pelaku dunia usaha dalam pengurusan perizinan dengan minimal <i>human interaction</i>	Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Kemenakertrans	

Tersedianya ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Tersedianya publikasi informasi secara <i>online</i> mengenai pengurusan perizinan tertentu, status permohonan perizinan serta izin yang telah diterbitkan (berserta dokumen pendukungnya)	Juni 2012	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas terhadap informasi dan status perizinan sesuai tahapan yang ditentukan, termasuk antara lain: 1. Jenis layanan dan mekanisme 2. Besar biaya dan lama waktu 3. Status proses aplikasi	Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Kemenakertrans	
9		Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Termanfaatkannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi berbasis TI di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Desember 2012	Peningkatan kemudahan masyarakat dan pelaku dunia usaha dalam pengurusan perizinan investasi dengan minimal <i>human interaction</i>	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	
10		Pelaksanaan transparansi layanan perizinan usaha di daerah	Jumlah Provinsi, Kabupaten dan kota yang telah memiliki PTSP mempublikasikan informasi perizinan	Desember 2012	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas terhadap informasi dan layanan di PTSP yang meliputi: 1. Jenis layanan dan mekanisme 2. Besar biaya dan lama waktu 3. Status proses aplikasi	Kementerian Dalam Negeri	

Pelaksanaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11		Pelaksanaan transparansi proses Pengadaan Badan Publik Pemerintah	Semua K/L dan Pemda (Prov/Kab/Kota) melaksanakan pengadaan barang/jasa menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dengan mendirikan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di K/L atau Pemda masing-masing, atau bergabung dengan LPSE terdekat. Sehingga, terbentuk satu LPSE Nasional	Desember 2012	Dalam APBN/APBD tahun 2012, sekurang-kurangnya 75 % dari seluruh belanja K/L dan 40 % belanja Pemda (Prov/Kab/Kota) yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa wajib menggunakan SPSE melalui LPSE sendiri atau LPSE terdekat	LKPP	Seluruh K/L, Pemerintah Daerah
12		Pelaksanaan transparansi dan partisipasi dalam proses rekrutmen PNS	Jumlah K/L dan Pemda yang mempublikasikan proses rekrutmen PNS pada <i>website</i> masing-masing yang terintegrasi dengan <i>website</i> KemenPAN dan RB	Desember 2012	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen PNS	KemenPAN dan RB	Seluruh K/L, Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri
			Terbangunnya mekanisme pengaduan masyarakat dalam proses rekrutmen PNS	Juni 2012			
			Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil rekrutmen PNS	Desember 2012			
13		Peningkatan transparansi dan akuntabilitas transportasi kereta api	Terpublikasinya Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 Bidang Perkeretaapian dan standar pelayanan publik (SPM angkutan orang dengan KA) melalui <i>website</i> di lingkungan Kementerian Perhubungan	Desember 2012	Pengelolaan transportasi kereta api yang transparan dan akuntabel sebagai salah satu layanan publik	Kementerian Perhubungan	BPK, Kementerian BUMN

Terpublikasinya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
			Terpublikasinya pemanfaatan PSO dan laporan triwulan melalui <i>website</i>	Desember 2012		Kementerian BUMN	
			Terpublikasinya hasil audit BPK secara berkala melalui <i>website</i>	Desember 2012		Kementerian Perhubungan	BPK
14		Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran negara	Terpublikasinya RAPBN, RKA-KL, APBN, DIPA, realisasi APBN seluruh K/L (triwulan, semester dan tahunan), Laporan audit APBN, data indikator dan alokasi anggaran DAU, DAK, DBH melalui <i>website</i> nasional Kemenkeu	Desember 2012	Pengelolaan anggaran negara yang transparan dan akuntabel	Kementerian Keuangan	
			Transparansi pendapatan negara dari pajak yang diuraikan secara per sektor				
			Terpublikasinya RAPBD, RKA-SKPD, APBD, DIPA Daerah, realisasi APBD seluruh SKPD, Laporan Audit APBD melalui <i>website</i> masing-masing Pemerintah Daerah	Desember 2012	Pengelolaan anggaran daerah yang transparan dan akuntabel	Kementerian Dalam Negeri	Pemerintah Daerah terkait

Terpenuhinya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Terpenuhinya kriteria/formula dalam pengalokasian dana <i>ad-hoc</i> ke daerah (apabila terdapat dana optimalisasi APBN)	Desember 2012	Penggunaan anggaran dana optimalisasi APBN yang ditransfer ke daerah sesuai dengan kriteria/formula	Kementerian Keuangan	Sekretariat DPR (Badan Anggaran DPR)
15		Pelaksanaan transparansi, dan akuntabilitas layanan publik di lembaga peradilan	Tersedianya informasi yang wajib dipublikasikan melalui <i>website</i> lembaga peradilan, antara lain terdiri dari: a. Profil Organisasi dan SDM, struktur organisasi dan tugas/fungsi unit, nama pejabat dan kontak pejabat yang dapat dihubungi b. Informasi mengenai penanganan perkara, prosedur bantuan hukum, biaya yang dibebankan dan waktu yang dibutuhkan, dan lain-lain c. Informasi penanganan perkara, publikasi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap	Agustus 2012	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga peradilan	Sekretariat MA	

Pelaksanaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16		Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di lembaga peradilan	Tertanganinya seluruh pengaduan masyarakat yang telah diklarifikasi  Terpublikasinya penanganan terhadap pengaduan masyarakat di lembaga peradilan melalui <i>website</i> MA	Desember 2012	Peningkatan kualitas pelayanan publik terkait penegakan hukum di lembaga peradilan	Sekretariat MA	Sekjen Ombudsman RI
17		Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI	Terbitnya Peraturan KaPolri tentang penegakan kode etik profesi Polri yang memuat tentang kelembagaan dan tata cara penegakan kode etik profesi Polri	Desember 2012	Peningkatan upaya pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum dan pengawasan terhadap kinerja Kepolisian dalam rangka pelayanan kepada masyarakat	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Komisi Kepolisian Nasional

Terselesaikannya ..



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Terselesaikannya jumlah laporan dan informasi tentang pelanggaran kode etik (tindak pidana korupsi) yang ditangani oleh Divisi Propam dan Kopolnas		Peningkatan penyelesaian jumlah laporan dan informasi baik dari anggota Polri maupun masyarakat tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum anggota Polri sebagai bentuk kepedulian masyarakat untuk mendukung percepatan pemberantasan korupsi		
18		Pelaksanaan <i>whistle blower system</i> di lingkungan Propam, Mabes Polri, Polda, dan Polres	Tersusunnya mekanisme (SOP) perlindungan terhadap <i>whistle blower</i> bagi aparat Kepolisian	April 2012	Peningkatan perlindungan bagi <i>whistle blower</i> di lingkungan Propam, Mabes Polda, Polri, dan Polres	Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Tertanganinya pengaduan aparat petugas ( <i>whistle blower</i> ) mengenai pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum di lingkungan Propam, Mabes Polri, Polda dan Polres	Desember 2012	Mendorong pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan aparat Propam, Mabes Polri, Polda dan Polres		

Penyediaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
19		Penyediaan <i>database</i> dakwaan penanganan perkara	Tersusunnya database penyusunan dakwaan perkara penting dalam penanganan perkara yang dapat diakses secara internal Kejaksaan (intranet Kejaksaan)	April 2012	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penguatan kapasitas Jaksa secara umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya</li><li>2. Peningkatan kualitas kebijakan pimpinan Kejaksaan Agung</li><li>3. Peningkatan kualitas Pengawasan kinerja Jaksa Penuntut Umum</li></ol>	Kejaksaan Agung	
20		Pelaksanaan transparansi informasi dan layanan publik di lingkungan kantor Kejaksaan dan penguatan pengawasan internal dan eksternal	Terpublikasinya informasi publik di Kejaksaan melalui <i>website</i> , meja informasi dan papan pengumuman di kantor Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang antara lain meliputi data-data: a. Profil Organisasi dan SDM, struktur organisasi dan tugas/fungsi unit, nama pejabat dan kontak pejabat yang dapat dihubungi b. Jenis layanan, mekanisme layanan (termasuk pengaduan), biaya yang dibebankan dan waktu yang dibutuhkan c. Informasi perkembangan penanganan perkara pidana sejak tahap penuntutan, upaya hukum dan eksekusi yang menginformasikan antara lain:	Juni 2012	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan	Kejaksaan Agung	

pembatasan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<p>pembatasan waktu, kriteria penggunaan upaya paksa, penelitian berkas perkara secara obyektif berdasarkan syarat formil maupun materil, pengelolaan barang bukti, dll</p> <p>d. Informasi dan status atas penanganan perkara, dakwaan yang telah dibacakan, publikasi jumlah kekayaan negara yang berhasil diselamatkan dan dikembalikan kepada Negara</p>				
21		Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan	<p>Tersedianya <i>mapping proses</i> dan penyelesaian/ tindak lanjut pengaduan masyarakat</p> <p>Tertanganinya seluruh pengaduan masyarakat yang telah di verifikasi</p> <p>Tersediannya <i>linked database</i> pengelolaan pengaduan antara Jamwas dan Komisi Kejaksaan</p>	<p>Maret 2012</p> <p>Juni 2012</p> <p>September 2012</p>	<p>1. Peningkatan kualitas layanan publik terkait tugas dan fungsi kejaksaan</p> <p>2. Berkurangnya potensi penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan aparat kejaksaan</p>	Kejaksaan Agung	Sekjen Ombudsman RI

Pelaksanaan ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaren	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
22		Pelaksanaan pengelolaan database WBP di LAPAS/RUTAN sebagai bahan pengambilan kebijakan institusi	Tersedianya <i>database</i> informasi mengenai penghuni LAPAS/RUTAN secara bertahap melalui <i>website</i> Ditjen PAS yang terintegrasi dengan <i>website</i> UPT PAS, Kanwil Kemenkumham, dan Kemenkumham	Desember 2012	Penanganan administrasi tahanan dan WBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan penyediaan informasi terkini yang akurat	Kementerian Hukum dan HAM	
23		Pelaksanaan transparansi data dan layanan Publik di lingkungan Pemasarakatan (LAPAS/RUTAN)	Terbentuknya unit layanan informasi di UPT Pemasarakatan di seluruh Indonesia	Desember 2012	Peningkatan kualitas pengelolaan informasi yang dapat diakses publik, tahanan, WBP, keluarganya sehingga masyarakat dengan mudah memperoleh informasi mengenai hak-haknya di UPT	Kementerian Hukum dan HAM	Seljen Ombudsman RI
			Terpublikasinya informasi antara lain terdiri dari: a. Informasi mekanisme (SOP) mengenai proses cuti, proses pembebasan bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), catatan perilaku penghuni LAPAS/tahanan, admisi dan orientasi layanan kunjungan, perawatan kesehatan di luar LAPAS/RUTAN, pemberian Remisi, dan lain-lain terkait	Desember 2012	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pamasarakatan	Kementerian Hukum dan HAM	

b. Informasi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			b. Informasi mengenai penghuni LAPAS/RUTAN (status hukuman dan lain-lain terkait)				
			Tersusunnya kajian tentang penilaian berkelakuan baik WBP berbasis teknologi	Desember 2012	Peningkatan kualitas penilaian berkelakuan baik WBP yang berbasis teknologi informasi sehingga dapat mengurangi praktek pungli		
24		Penguatan pengawasan internal di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan dalam upaya mengawasi dan evaluasi perilaku dan kinerja termasuk penyimpangan/ pelanggaran yang dilakukan oleh petugas LAPAS/RUTAN	Tersedianya mekanisme (SOP) pengawasan internal di lingkungan Pemasyarakatan termasuk pelaksanaan evaluasi perilaku dan kinerja serta penyimpangan oknum petugas LAPAS/RUTAN	Agustus 2012	Berkurangnya pelanggaran/penyimpangan perilaku aparat Pemasyarakatan	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi mekanisme pengawasan internal melalui <i>website</i> Ditjen PAS				
			Terpublikasinya hasil pengawasan internal di <i>website</i> Ditjen PAS				

Penguatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25		Penguatan pengawasan eksternal melalui kerjasama dengan Ombudsman RI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, Satgas PMH, Hakim Wasmatdalam	Tersedianya mekanisme (SOP) pengawasan eksternal di lingkungan Pemasyarakatan termasuk pelaksanaan evaluasi perilaku dan kinerja serta penyimpangan oknum petugas LAPAS/RUTAN	Agustus 2012	Berkurangnya pelanggaran/penyimpangan perilaku aparat Pemasyarakatan	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI, Satgas PMH, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, Hakim Wasmatdalam
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi mekanisme pengawasan eksternal di <i>website</i> Ditjen PAS				
			Terpublikasinya hasil pengawasan eksternal di <i>website</i> Ditjen PAS				
			Terlaksananya SIDAK secara acak (sesuai kebutuhan)	Desember 2012	Berkurangnya penyimpangan yang dilakukan aparat dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang memberikan pelayanan Publik.	Kementerian Hukum dan HAM serta Sekjen Ombudsman RI	
26		Pelaksanaan <i>whistle blower system</i> di lingkungan LAPAS/RUTAN	Tersedianya mekanisme perlindungan terhadap <i>whistle blower</i> bagi petugas di lingkungan aparat Pemasyarakatan	Desember 2012	Mendorong upaya perbaikan dan meningkatkan peran dan fungsi pengawasan terhadap kinerja aparat Pemasyarakatan	Kementerian Hukum dan HAM	

Penanganan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penanganan yang responsif atas pengaduan aparat Pemasyarakatan ( <i>whistle blower</i> ) mengenai pelanggaran disiplin atau pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum di lingkungan Pemasyarakatan	Desember 2012	Peningkatan perlindungan bagi <i>whistle blower</i> di lingkungan LAPAS/RUTAN		
			Infrastruktur <i>whistle blower</i> (misal telepon khusus, kotak keluhan/surat, <i>complaint center</i> , pengaduan <i>online</i> ) yang dapat langsung ditujukan kepada pengawas Pemasyarakatan	Desember 2012	Tersedianya Infrastruktur <i>whistleblower</i> secara bertahap di LAPAS dan RUTAN		
27		Pelaksanaan pengawasan terhadap evaluasi kinerja tahunan pelayanan pejabat Rutan dan Lapas	Tersedia instrumen survei kinerja untuk mengukur kinerja fungsi pelayanan WBP yang disusun dengan melibatkan berbagai pihak terkait (a.l. KPK, Ombudsman RI dan pakar)	Mei 2012	Peningkatan kualitas layanan LAPAS/RUTAN bagi WBP	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI, Sekjen KPK

Penyusunan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penyusunan Permenkumham tentang syarat dan tata cara pengangkatan jabatan kepala UPT Pemasarakatan tertentu yang memuat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Syarat administratif dan substantif berupa pengajuan lamaran, pemaparan visi misi dan program dan kesediaan untuk menandatangani kontrak kinerja</li><li>- Mekanisme pengangkatan jabatan</li></ul>	Desember 2012	Peningkatan integritas dan kualitas Kepala jabatan UPT Pemasarakatan melalui tata cara pengangkatan yang transparan dan akuntabel		
28		Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap tugas dan fungsi LAPAS/RUTAN	Tersedianya sarana pengaduan masyarakat dan proses pengelolaan pengaduan masyarakat secara responsif terhadap kinerja LAPAS/RUTAN. Tertanganinya seluruh pengaduan masyarakat yang telah diverifikasi	Desember 2012 Desember 2012	Peningkatan kualitas layanan LAPAS/RUTAN.	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI

Pelaksanaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29		Pelaksanaan transparansi Layanan Publik di lingkungan Keimigrasian	Penguatan sistem informasi keimigrasian (SIMKIM) dalam rangka keterbukaan informasi keimigrasian yang antara lain memuat: a. Profil Organisasi dan SDM, struktur organisasi dan tugas/fungsi unit, nama pejabat dan kontak pejabat yang dapat dihubungi b. Jenis layanan Keimigrasian antara lain, mekanisme layanan paspor dan lainnya (termasuk pengaduan), biaya yang dibebankan dan waktu yang dibutuhkan melalui media <i>website</i> , dan lain-lainnya c. Informasi dan status atas pelayanan Keimigrasian yang diberikan serta informasi wajib lainnya sesuai dengan ketentuan KIP	Desember 2012	Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Imigrasi	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI
30		Penguatan pengawasan internal di lingkungan Ditjen Imigrasi	Tersedianya mekanisme (SOP) pengawasan internal di lingkungan Keimigrasian termasuk pelaksanaan evaluasi perilaku dan kinerja serta penyimpangan oknum petugas Keimigrasian	Desember 2012	Berkurangnya pelanggaran/ penyimpangan perilaku aparat Imigrasi	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI

Terpublikasinya ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 19 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
			Terpublikasinya hasil pengawasan internal di <i>website</i> Ditjen Imigrasi				
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi mekanisme pengawasan internal di <i>website</i> Ditjen Imigrasi	Desember 2012	1. Peningkatan perlindungan bagi <i>whistle blower</i> di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 2. Mendorong pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan aparat Kementerian Hukum dan HAM		
31		Penguatan pengawasan eksternal di lingkungan Ditjen Imigrasi	Tersedianya mekanisme (SOP) pengawasan eksternal di lingkungan Keimigrasian termasuk pelaksanaan evaluasi perilaku dan kinerja serta penyimpangan oknum petugas Keimigrasian	Desember 2012	Berkurangnya pelanggaran/ penyimpangan perilaku aparat Imigrasi	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI, Satgas PMH
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi mekanisme pengawasan eksternal di <i>website</i> Ditjen Imigrasi	Desember 2012			
			Terpublikasinya hasil pengawasan eksternal dalam <i>website</i> Ditjen Imigrasi	Desember 2012			

Pelaksanaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
32		Pelaksanaan sistem <i>whistle blower</i> di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Tersedianya mekanisme (SOP) perlindungan bagi petugas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Desember 2012	1. Peningkatan perlindungan bagi <i>whistle blower</i> di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 2. Mendorong pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan aparat Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Hukum dan HAM	
33		Penyelesaian atas pengaduan masyarakat terhadap tugas dan fungsi Keimigrasian	Tertanganinya seluruh pengaduan masyarakat atas layanan keimigrasian	Desember 2012	Peningkatan kualitas pelayanan publik dilingkungan keimigrasian	Kementerian Hukum dan HAM	Seljen Ombudsman RI
			100% pengaduan masyarakat ditindaklanjuti	Desember 2012			

Pelaksanaan ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34		Pelaksanaan transparansi Layanan Publik di lingkungan Ditjen AHU	Penguatan Sistem Administrasi Badan Hukum yang memberikan Keterbukaan Informasi administrasi badan hukum yang antara lain memuat: a. Profil Organisasi dan SDM, struktur organisasi dan tugas/fungsi unit, nama pejabat dan kontak pejabat yang dapat dihubungi b. Jenis layanan, mekanisme layanan AHU (pendaftaran badan usaha dan lainnya termasuk pengaduan), biaya yang dibebankan dan waktu yang dibutuhkan melalui media <i>website</i> , meja informasi dan lain-lainnya c. Informasi dan status atas pelayanan AHU yang diberikan	Desember 2012	Peningkatan pelayanan kepada <i>stakeholders</i> terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen AHU	Kementerian Hukum dan HAM	
35		Penyusunan mekanisme pengawasan internal di lingkungan Ditjen AHU	Tersedianya mekanisme (SOP) pengawasan internal di lingkungan Ditjen AHU termasuk pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan serta penyimpangan oknum petugas di lingkungan Ditjen AHU	Agustus 2012	Berkurangnya pelanggaran/ penyimpangan perilaku petugas pelayanan AHU	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI

Pelaksanaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36		Pelaksanaan <i>whistle blower</i> di lingkungan Ditjen AHU	Tersedianya mekanisme (SOP) perlindungan terhadap <i>whistle blower</i> bagi petugas pelayanan	Desember 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan perlindungan bagi <i>whistle blower</i> di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>- Mendorong pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan aparat Kementerian Hukum dan HAM</li> </ul>	Kementerian Hukum dan HAM	
37		Pelaksanaan pengaduan masyarakat di lingkungan Ditjen AHU	<p>Tersedianya sarana pengaduan masyarakat terhadap tugas dan fungsi Ditjen AHU</p> <p>Tertanganinya seluruh pengaduan masyarakat yang telah diverifikasi</p> <p>Terpublikasinya pelaksanaan pengaduan masyarakat melalui <i>website</i> AHU</p>	Desember 2012	Peningkatan upaya pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan petugas pelayanan dan pengawasan terhadap kinerja Ditjen AHU dalam rangka pelayanan kepada masyarakat	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI

Pelaksanaan ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
39		Pelayanan peralihan hak dan pembebanan hak sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Kantor Pertanahan di berbagai provinsi yang melaksanakan pelayanan tunggal kegiatan peralihan hak jual beli, inbreng, merger dan kegiatan pembebanan sesuai ketentuan yang berlaku (125 Kantor Pertanahan termasuk 50 Kantor Pertanahan yang lama)  Terselesaikannya 85% jumlah total permohonan pelayanan peralihan dan pembebanan hak yang masuk sesuai waktu penyelesaiannya dan biaya yang ditetapkan	Desember 2012	Peningkatan kualitas pelayanan Publik di bidang pertanahan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel yang bebas dari korupsi	BPN	Sekjen Ombudsman RI
40		Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Kantor Pertanahan dan BPN	Tersedianya sarana pengaduan masyarakat dan proses pengelolaan pengaduan masyarakat secara responsif melalui portal BPN di 50 Kantor Pertanahan ( <i>pilot project</i> )	Juni 2012	Peningkatan upaya pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan petugas pelayanan dan pengawasan terhadap kinerja Kantor Pertanahan dan BPN dalam rangka pelayanan kepada masyarakat	BPN	Sekjen Ombudsman RI

Penerapan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
41		Penerapan Pelayanan pertanahan berbasis sistem loket	Terlaksananya pelayanan pertanahan kepada masyarakat di 75 kantor Pertanahan dengan sistem loket termasuk Kantor Pertanahan yang terindikasi terjadi banyak penyimpangan berdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2010 tentang Locket Layanan	September 2012	Peningkatan upaya pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan petugas kantor pertanahan dan BPN  Pengawasan kinerja Kantor Pertanahan dan BPN dalam rangka pelayanan kepada masyarakat	BPN	Sekjen Ombudsman RI
42		Pelaksanaan <i>whistle blower system</i> di lingkungan kantor Pertanahan dan BPN	Tersusunnya mekanisme (SOP) perlindungan bagi aparat/petugas di Kantor Pertanahan dan BPN  Tertanganinya seluruh pengaduan aparat/petugas di kantor Pertanahan dan BPN ( <i>whistle blower</i> ) terkait pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum	Juni 2012  Desember 2012	1. Peningkatan perlindungan bagi <i>whistle blower</i> di lingkungan Kantor Pertanahan dan BPN 2. Mendorong pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan aparat Kantor Pertanahan dan BPN	BPN	
43		Penguatan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan NIK dan e-KTP	Terlaksananya pengawasan atas penerbitan NIK di 497 Kab/Kota dan e-KTP di 300 Kab/Kota (100,51 juta jiwa)	Desember 2012	Meminimalisir terjadinya penyimpangan atas penerbitan NIK dan e-KTP yang berpotensi korupsi	Kementerian Dalam Negeri	

Pengawasan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
44		Pengawasan terhadap optimalisasi pelaksanaan koneksitas data kependudukan dari penyelenggara ke instansi pengguna	Tersedianya database kependudukan nasional berbasis NIK yang dapat di akses oleh K/L terkait  Jumlah K/L yang dapat mengakses dan memanfaatkan database kependudukan sebagai dasar penerbitan dokumen, informasi untuk pelayanan publik terkait ( <i>Pilot Project</i> dengan 5 K/L)	September 2012  Desember 2012	Peningkatan pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK nasional oleh K/L	Kementerian Dalam Negeri	
45		Pelaksanaan transparansi pengelolaan anggaran Daerah	Jumlah Provinsi, Kab/Kota yang mempublikasikan data mutakhir APBD, RAPBD, RKA SKPD, APBD, DPA SKPD, LKPD, laporan realisasi anggaran melalui <i>website</i> nasional Kemendagri dan <i>website</i> masing-masing Penda	Juni 2012	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pemerintah daerah	Kementerian Dalam Negeri	
46		Pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Publikasi informasi penerimaan dan belanja negara terkait pengelolaan sumber daya alam di bidang minyak, gas, dan pertambangan secara rutin dalam <i>website</i>	Desember 2012	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Kementerian BUMN	

Publikasi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Publikasi pelaporan pendapatan daerah dari industri ekstraktif (minyak, gas, dan tambang) secara rutin dalam <i>website</i> Pemerintah Daerah			Kementerian Dalam Negeri	Pemerintah Daerah
			Persentase data <i>cost recovery</i> yang di publikasikan dalam <i>website</i>			Kementerian BUMN	Kemenkeu, BI
			Publikasi rehabilitasi pasca tambang dalam <i>website</i>			Kementerian ESDM	
			Publikasi laporan penerimaan negara dari industri ekstraktif (minyak, gas dan tambang) melalui <i>website</i>		Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan industri ekstraktif (minyak, gas dan tambang)	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	
47		Pelaksanaan transparansi Layanan Publik di lingkungan Bea dan Cukai	Terlaksananya pelayanan cukai yang cepat, akurat, efektif dan efisien melalui sistem pelayanan cukai <i>online</i> berbasis web yang terintegrasi secara nasional	Desember 2012	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di lingkungan Bea dan Cukai	Kementerian Keuangan	
48		Pelaksanaan kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan PPAK dalam rangka pertukaran data	Terlaksananya pertukaran data berdasarkan <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> antara Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak) dengan PPAK	Desember 2012	Peningkatan kualitas <i>Governance</i> Dirjen Pajak di bidang pemeriksaan berbasis analisis risiko dengan data yang andal	Kementerian Keuangan	

Pelaksanaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
49		Pelaksanaan <i>whistle blower system</i> di lingkungan Dirjen Pajak	Terselesaikannya 60% kasus pengaduan yang masuk, secara transparan dan konsisten	Desember 2012	Peningkatan perlindungan bagi <i>whistle blower</i> di lingkungan Dirjen Pajak	Kementerian Keuangan	
			Terselesaikannya infrastruktur dan sistem informasi pendukung pelaksanaan <i>whistle blower system</i> di DJP berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No PER-22/PJ.11/2011	Desember 2012	Mendorong pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan aparat Dirjen Pajak		
50		Penerapan Pakta Integritas secara konsisten pada K/L, Pemerintah Daerah dan pengawasannya oleh komponen masyarakat.	Terlaksananya penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh K/L serta Pemda Prov/Kab/Kota (Bebas Korupsi) dengan BPK, BPKP, KPK (untuk K/L), Kejaksaan dan POLRI (untuk Pemda Prov/Kab/ Kota) serta CSO setempat yang bergerak di Bidang Anti Korupsi	Maret 2012	Peningkatan integritas K/L dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing	Kementerian PAN dan RB	BPK, BPKP, Sekjen KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia
			Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas integritas K/L maupun Pemda terkait	Desember 2012			
51		Pembangunan sistem Pengendalian dan pengawasan proses pelayanan publik	Tersedianya sistem pengendalian dan pengawasan pelayanan publik berbasis TI	Agustus 2012	1. Peningkatan kegiatan pengawasan pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi	Sekjen Ombudsman RI	

berbasis ...





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 29 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		berbasis Teknologi Informasi (TI)	Terselesaikannya laporan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik		2. Peningkatan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik		
52		Penguatan Pengawasan atas penyaluran serta penggunaan dana BOS yang dikelola Kemendikbud	Tersedia dan terlaksananya revisi sistem pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOS secara <i>online</i>	Desember 2012	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyaluran dan penggunaan dana BOS	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
53		Penguatan pengawasan atas penyaluran serta penggunaan dana BOS yang dikelola Kementerian Agama	Tersedia dan terlaksananya revisi sistem pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOS secara <i>online</i>	Desember 2012	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyaluran dan penggunaan dana BOS	Kementerian Agama	
54		Pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOK, Jamkesmas dan Jampersal yang bebas korupsi	Tersedianya dan terlaksananya sistem pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOK, Jamkesmas dan Jampersal secara <i>online</i>	Desember 2012	Sistem pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOK, Jamkesmas dan Jampersal yang transparan dan akuntabel secara <i>online</i>	Kementerian Kesehatan	BPKP

Pengawasan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
55		Pengawasan atas pelaksanaan proses registrasi alat kesehatan secara <i>online</i>	Tersedianya dan terlaksananya sistem pengawasan atas pelaksanaan proses registrasi alat kesehatan secara <i>online</i>	Desember 2012	Sistem pengawasan atas pelaksanaan proses registrasi alat kesehatan yang transparan dan akuntabel secara <i>online</i>	Kementerian Kesehatan	Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Bapeten
56		Peningkatan transparansi dan akuntabilitas di bidang pertambangan dan migas.	Terlaksananya proses penentuan kebijakan di bidang pertambangan melalui pemanfaatan TI	Desember 2012	Tersedianya sistem informasi pengelolaan di bidang pertambangan mineral dan batubara secara transparan	Kementerian ESDM	Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah
			Peninjauan pemberian izin pertambangan oleh Pemda	Desember 2012	Terselesainya inventarisasi izin pertambangan yang diberikan oleh Pemda	Kementerian ESDM	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Daerah

Peningkatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
			Peningkatan monitoring operasional pertambangan	Desember 2012	Termonitornya kegiatan operasional pertambangan yang dapat dipertanggungjawabkan	Kementerian ESDM	Pemerintah Daerah
			Laporan penyusunan penetapan daerah penghasil dan alokasi dasar penghitungan <i>lifting</i> migas serta realisasi <i>lifting</i> migas setiap triwulan	Desember 2012	Penetapan perkiraan <i>lifting</i> migas per daerah penghasil dapat lebih cepat, tepat dan akurat	Kementerian ESDM	Kementerian Dalam Negeri, Bakosurtanal, Pemerintah Daerah
			Laporan implementasi, pemeliharaan dan pengembangan sistem monitoring <i>lifting</i> migas	Desember 2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diperolehnya data volume produksi dan <i>lifting</i> secara <i>online</i> dan kontinyu</li> <li>2. Membangun akses informasi volume produksi dan <i>lifting</i> migas bagi seluruh <i>stakeholder</i> secara cepat dan transparan</li> <li>3. Tersedianya bahan evaluasi bagi pimpinan dalam rangka membuat kebijakan terkait dengan kegiatan produksi dan <i>lifting</i> migas</li> </ol>	Kementerian ESDM	Kementerian Dalam Negeri, BP MIGAS

Laporan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Laporan penyiapan dan implementasi e-proc Ditjen Migas - KESDM	Desember 2012	Meningkatkan pelayanan, transparansi dan akuntabilitas di bidang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ditjen Migas – KESDM	Kementerian ESDM	LKPP
			Laporan pengelolaan dan pengembangan data dan sistem informasi teknologi serta jaringan	Desember 2012	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terbentuknya sistem pelayanan yang bersih, transparan dan efisien</li><li>2. Memberikan layanan investasi terpadu secara <i>online</i> di Ditjen Migas</li><li>3. Perbaikan organisasi data, sistem informasi dan proses kerja pelayanan</li><li>4. investasi Ditjen Migas</li></ol>	Kementerian ESDM	
			Termonitornya efek lingkungan hidup dalam kegiatan operasional pertambangan	September 2012	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam kegiatan operasional pertambangan	Kementerian Lingkungan Hidup	

Memperkuat ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 33 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
57		Memperkuat koordinasi dan supervisi bidang pencegahan baik di K/L maupun di daerah	Penguatan pelaksanaan koordinasi dan supervisi KPK bidang Pencegahan dengan sasaran sistem PBJ, sistem penganggaran dan pelayanan publik di semua Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia melalui : 1. Supervisi, membenahan sistem layanan publik di Pemprov/Pemkot dan Pemkab 2. Koordinasi dengan Pemprov, Pemkot dan Pemkab pada sistem PBJ dan sistem penganggaran/keuangan 3. Tahun 2012 akan dilaksanakan di 33 Provinsi masing-masing 3 lokasi di Provinsi, Kota dan Kabupaten	Desember 2012	Optimalisasi fungsi koordinasi dan supervisi bidang Pencegahan	Sekjen KPK	
<b>Implementasi UU Pelayanan Publik</b>							
58		Penerapan Undang-undang Pelayanan Publik	Terbitnya PermenPAN dan RB tentang Juknis Standar Pelayanan Publik	April 2012	Peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan standar yang sama di K/L dan Daerah	Kementerian PAN dan RB	Sekjen Ombudsman RI
			Terdiseminasikannya UU Pelayanan Publik dan peraturan pelaksanaannya ke seluruh K/L dan Pemda	Juni 2012			

Pemantauan ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 34 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
59		Pemantauan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di daerah	Terfasilitasinya pelaksanaan pelayanan publik di daerah berdasarkan indikator utama (fasilitasi untuk penyusunan 15 SPM)	Juni 2012	Peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah sesuai SPM	Kementerian Dalam Negeri	Pemerintah Daerah, Sekjen Ombudsman RI
60		Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik	Tersedianya instrumen pemantauan dan evaluasi/penilaian penyelenggaraan pelayanan publik	Juni 2012	Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan publik	Kementerian PAN dan RB	Selgen Ombudsman RI
			Terpublikasinya hasil evaluasi/penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan publik pada penyelenggara terpilih yang sangat strategis	Desember 2012			
61		Penyempurnaan mekanisme perizinan di bidang lingkungan hidup	Terbitnya RPP baru/revisi dan peraturan dibawahnya tentang perizinan dibidang lingkungan hidup yang berazas cepat, non diskriminatif, transparan, akuntabel dan harga yang terjangkau	Juni 2012	Peningkatan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku dunia usaha dalam pengurusan perizinan di bidang lingkungan hidup tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar	Kementerian Lingkungan Hidup	
62		Penyempurnaan sistem pengendalian intern yang menekankan pada <i>soft control</i>	Terbitnya 60 laporan hasil perbaikan sistem pengendalian intern yang berbasis risiko	Desember 2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, pengamanan aset yang tinggi</li> <li>2. Peningkatan kehandalan laporan keuangan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah</li> </ol>	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Seluruh K/L, Pemerintah Daerah

3. Berkurangnya .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 35 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					3. Berkurangnya perilaku korupsi dalam organisasi pemerintah		
63		Penyusunan peraturan sistem pengendalian intern di Kementerian/ Lembaga dan Pemda	Terbitnya 90 Peraturan Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati dan Walikota	Desember 2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, pengamanan asset yang tinggi</li> <li>2. Peningkatan kehandalan laporan keuangan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah</li> <li>3. Berkurangnya perilaku korupsi dalam organisasi pemerintah</li> </ol>	BPKP	Seluruh K/L, Pemerintah Daerah, Sekjen Ombudsman RI
<b>Pembenahan Sistem Melalui Reformasi Birokrasi</b>							
64		Penyusunan peraturan pelaksanaan UU No. 17/2003 mengenai anggaran berbasis kinerja	Tersusunnya Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-KL	Desember 2012	Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan negara yang transparan dan akuntabel	Kementerian Keuangan	Kementerian Hukum dan HAM
65		Penyusunan peraturan mengenai sistem rekrutmen pegawai di seluruh K/L secara <i>online</i>	Terbitnya peraturan tentang sistem rekrutmen pegawai di seluruh K/L secara <i>online</i>	Juni 2012	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen pegawai di seluruh K/L	Kementerian PAN dan RB	Seluruh K/L

Perubahan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
66		Perubahan PP Disiplin PNS (PP 53/2010) yang mengatur penjatuhan sanksi bagi PNS yang memiliki kekayaan tidak wajar	1. Terbitnya revisi PP 53 tahun 2010 (pasal 6) tentang Disiplin PNS. Oleh karena proses pembuktian terbalik merupakan proses yustisia maka revisi PP tersebut antara lain mengatur : <ul style="list-style-type: none"><li>- Apabila seorang PNS yang sedang dalam proses penyelidikan, atau penyidikan, atau dalam proses peradilan yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan pemeriksaan oleh atasan yang berwenang terhadap harta kekayaannya yang dinilai tidak wajar</li><li>- Dalam hal atasan memperoleh bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan bahwa harta kekayaan PNS dimaksud diperoleh dengan tidak wajar, maka atasan yang berwenang dapat menjatuhkan hukuman disiplin, namun mengingat rasa keadilan maka penjatuhan hukuman disiplin dilakukan setelah ada putusan</li></ul>	September 2012	Peningkatan akuntabilitas PNS serta pengawasan dari pihak internal dan eksternal terkait dengan perolehan harta kekayaannya	Kementerian PAN dan RB	Kementerian Hukum dan HAM, Setneg, Kementerian Dalam Negeri, BKN, Sekjen Ombudsman RI

peradilan ...





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 37 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
			peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap mengenai hukum pidana korupsinya 2. Pengaturan mekanisme pelaksanaan sanksi 3. Pemberian kewenangan kepada Instansi pengawas internal dan eksternal untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran				
67		Pengawasan seleksi dan promosi di lembaga penegak hukum	Tersedianya mekanisme pengawasan seleksi dan promosi bagi aparat penegak hukum Tersedianya laporan mengenai pengawasan seleksi dan promosi bagi aparat penegak hukum Tersedianya hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan seleksi dan promosi bagi aparat penegak hukum	Mei 2012  Desember 2012	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi dan promosi aparat penegak hukum	Kementerian PAN dan RB	Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan

Penyusunan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
68		Penyusunan peraturan pelaksanaan rotasi dan promosi PNS secara terbuka, akuntabel dan berbasis kompetensi	Terbitnya Peraturan Pemerintah mengenai keterbukaan informasi dalam pelaksanaan rotasi dan promosi PNS Terpublikasinya hasil evaluasi terhadap pelaksanaan sistem rotasi dan promosi PNS	Juni 2012	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen kepegawaian termasuk rotasi dan promosi PNS	Kementerian PAN dan RB	Kementerian Hukum dan HAM, Setneg, Kementerian Dalam Negeri, BKN
69		Pengangkatan dalam jabatan dan rotasi berbasis kompetensi	Terbitnya Peraturan Menteri PAN dan RB tentang standarisasi kompetensi jabatan	Juni 2012	Peningkatan kinerja PNS	Kementerian PAN dan RB	Kementerian Hukum dan HAM, Setneg, Kementerian Dalam Negeri, BKN, BPKP, LAN, dan pengawasan Internal Instansi
70		Penyusunan pengaturan mengenai anti benturan kepentingan ( <i>conflict of interest</i> )	Terbitnya Peraturan Menteri PAN dan RB mengenai Konflik Kepentingan bagi pejabat di lingkungan birokrasi	Juni 2012	Berkurangnya praktek penyalahgunaan kewenangan pejabat dalam proses penyusunan kebijakan	Kementerian PAN dan RB	BKN, LAN

Penguatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
71		Penguatan lembaga peradilan berdasarkan <i>competency based</i>	<p>Terlaksananya seleksi calon hakim berdasarkan kompetensi</p> <p>Terlaksananya diklat dan sertifikasi berdasarkan hasil seleksi kompetensi hakim</p>	Desember 2012	Peningkatan jumlah Hakim yang memiliki kompetensi dan integritas yang dibutuhkan dalam penegakan hukum	Sekretariat MA	
72		Pengawasan dan pelaksanaan kewajiban terkait LHKPN (UU RI Nomor 28 Tahun 1999) oleh pejabat minimal eselon II dan/atau pos-pos strategis yang ditentukan di K/L	<p>Persentase LHKPN yang terkini dari pejabat minimal eselon II dan/atau pos-pos strategis yang menempati jabatan baru atau selesai menjabat</p> <p>Pelaksanaan dan Pemantauan penjatuhan sanksi administratif oleh K/L bagi pejabat minimal eselon II dan/atau pos-pos strategis yang tidak melaporkan LHKPN terkini</p>	Desember 2012	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kekayaan pejabat minimal eselon II dan/atau pos-pos strategis yang baru menduduki jabatan, menempati jabatan baru atau selesai menjabat	Kementerian PAN dan RB	Sekjen KPK, Seluruh K/L

Perbaikan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
73		Perbaiki sistem pengelolaan dan pengalokasian anggaran pada lembaga penegak hukum	<p>Tersedianya hasil audit sistem pengelolaan anggaran yang dilakukan di lembaga penegak hukum yang antara lain memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Praktek pengelolaan anggaran</li> <li>• Efisiensi dan ketepatan pengelolaan dan pengalokasian anggaran</li> <li>• Pertanggungjawaban penggunaan anggaran</li> <li>• Analisis kebutuhan riil anggaran</li> <li>• Rencana untuk pemenuhan kebutuhan anggaran (termasuk rencana untuk memanfaatkan berbagai ketentuan hukum yang memungkinkan peningkatan sumbangan PNBPN bagi Negara oleh lembaga penegak hukum)</li> </ul>	September 2012	Pengelolaan dan pengalokasian anggaran lembaga penegak hukum yang sesuai dengan kebutuhan riil untuk mendukung efektifitas pelaksanaan kinerja lembaga penegak hukum	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM	BPKP, BPK, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Kementerian Keuangan, Sekjen KPK
74		Pelaksanaan tindak lanjut hasil survei kinerja fungsi penanganan perkara	Laporan hasil survei kinerja fungsi penanganan perkara yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan Agung secara bersama dengan pengawas eksternal	Agustus 2012	Peningkatan kualitas Kinerja kepolisian dan Kejaksaan Agung terkait fungsi penanganan perkara	Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia	Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Sekjen Ombudsman RI
			Laporan tindak lanjut hasil survey kinerja fungsi penanganan perkara dan rekomendasi	Desember 2012			

Penempatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
75		Penempatan pejabat strategis lembaga penegak hukum	Terdokumentasinya hasil <i>assessment</i> pejabat-pejabat pada posisi strategis, yang bisa diakses secara terbatas, dengan parameter-parameter, termasuk antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifikasi terhadap harta kekayaan LHKPN dan transaksi keuangan (dengan meminta input dari KPK dan PPAK)</li> <li>- verifikasi terhadap kinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)</li> <li>- evaluasi kinerja dalam penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebelumnya</li> </ul>	Desember 2012	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penempatan pejabat di pos-pos strategis yang dilakukan melalui proses <i>assessment</i>	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM	Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Sekjen KPK, PPAK, Sekjen Ombudsman RI
76		Penerapan rekrutmen penyidik melalui <i>assessment</i> (khusus)	Jumlah penyidik yang direkrut melalui <i>assessment</i> (khusus)	Desember 2012	Peningkatan jumlah penyidik yang memiliki kompetensi khusus dan berintegritas berdasarkan proses yang adil dan akuntabel	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kementerian PAN dan RB, Komisi Kepolisian Nasional
77		Pelaksanaan rekrutmen pegawai dan calon Jaksa dilaksanakan oleh pihak ketiga yang independen	Laporan pelaksanaan rekrutmen pegawai dan calon Jaksa oleh pihak ketiga yang independen	Desember 2012	Peningkatan jumlah pegawai dan jaksa yang memiliki kompetensi dan berintegritas berdasarkan proses yang adil dan akuntabel	Kejaksaan Agung	Kementerian PAN dan RB, Komisi Kejaksaan

Pemberdayaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
78		Pemberdayaan pengawasan eksternal dalam kerangka EMI (pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawasan Internal) dan IME (pengawasan Internal Mendukung pengawasan Eksternal) dalam Kepolisian	Tindak lanjut pengaduan/rekomendasi/klarifikasi/perbaikan dari Kopolnas, BPK, ORI, BPKP, KPK, Komnas HAM, KPIA, Komnas Perempuan, DPR, dan Organisasi Masyarakat Sipil oleh Kepolisian	Desember 2012	Peningkatan akuntabilitas dan integritas kepolisian melalui pengawasan internal dan eksternal	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Komisi Kepolisian Nasional, BPK, Sekjen Ombudsman RI, BPKP, Sekjen KPK, Komnas HAM, KPIA, Sekjen DPR, Komnas Perempuan
79		Pelaksanaan penegakan hukum terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan petugas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Laporan pelaksanaan kode etik dan pelanggaran disiplin Terpublikasinya kepada masyarakat atas pelaksanaan pengenaan sanksi hukum maupun administrasi kepada pejabat dan petugas yang telah melakukan pelanggaran	Desember 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin dan kode etik serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum</li> <li>- Menurunnya jumlah pejabat dan petugas bermasalah yang dipromosikan dan dimutasikan</li> </ul>	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI

Penyusunan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Kejuaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
80		Penyusunan aturan administrasi petugas pengawasan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Tersedianya kualifikasi khusus terhadap petugas yang ditempatkan pada pengawasan internal	Juli 2012	Petugas pengawasan internal yang berintegritas	Kementerian Hukum dan HAM	
81		Penguatan komitmen para pihak dalam pemberantasan penyelundupan	Terlaksananya <i>Memorandum of Understanding</i> antara Kementerian Keuangan dengan Badan Koordinasi Keamanan Laut	Juli 2012	Pemberian peran yang memadai bagi para pihak untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dalam pemberantasan penyelundupan	Kementerian Keuangan	Badan Koordinasi Keamanan Laut
82		Penguatan fungsi supervisi dan pengendalian atas PNBP	Pelaksanaan kajian mengenai organisasi di K/L yang memiliki fungsi melakukan supervisi dan mengendalikan atas PNBP pada setiap K/L	Desember 2012	Rekomendasi kelembagaan pelaksana supervisi/pembinaan PNBP di K/L	Kementerian PAN dan RB	Kementerian Keuangan
			Pelaksanaan kajian mengenai kebijakan dalam pengelolaan PNBP di K/L		Rekomendasi kebijakan supervisi dan pengendalian PNBP yang memadai oleh K/L	Kementerian Keuangan	Kementerian PAN dan RB

STRATEGI ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>STRATEGI PENEGAKAN HUKUM</b>							
<b>Memperkuat Koordinasi Lembaga Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus Korupsi</b>							
83		Pemberantasan korupsi untuk menyelamatkan uang Negara berdasarkan prioritas	<p>Terpetakannya 10 (sepuluh) area kerawanan korupsi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan</p> <p>Terlaksananya penindakan terhadap kasus korupsi berdasarkan pemetaan sektor rawan korupsi dan nilai kerugian Negara</p>	<p>Maret 2012</p> <p>Desember 2012</p>	Peningkatan kualitas penindakan perkara korupsi di Lembaga Negara dan BUMN yang terfokus berdasarkan prioritas	Kejaksaan Agung	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekjen KPK, Sekjen Ombudsman RI
84		Memperkuat penanganan kasus korupsi dan mekanisme pengaduan masyarakat serta penguatan koordinasi diantara lembaga penegak hukum didukung IT yang dilaksanakan secara komprehensif (e-law enforcement)	<p>Penguatan pelaksanaan koordinasi dan supervisi KPK bidang Penindakan dan Pencegahan, dengan keluaran (dilaksanakan di Pusat dan 33 Propinsi di Indonesia):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Supervisi penanganan tindak pidana korupsi sejumlah 128 kasus.</li> <li>Koordinasi penanganan tipikor 64 kasus.</li> </ol> <p>Peningkatan kemampuan SDM aparat penegak hukum dalam penanganan perkara TPK, melalui workshop, / bimbingan teknis. Peserta dari Folda, Kajati, BPKP, Itjen dan LSM dengan target 600 peserta.</p>	Desember 2012	Optimalisasi fungsi koordinasi dan supervisi bidang Penindakan adalah dalam rangka meningkatkan penyelesaian perkara yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian	Sekjen KPK	Sekjen Ombudsman RI

Peningkatan ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
85		Peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam setiap proses penyidikan tindak pidana korupsi	Laporan rekapitulasi penyampaian SPDP kasus korupsi dari Kepolisian kepada Kejaksaan dan KPK serta dari Kejaksaan kepada KPK	Desember 2012	Penanganan kasus korupsi berjalan lebih efektif	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung	Sekjen KPK, Sekjen Ombudsman RI
86		Pelaksanaan Peraturan Bersama lembaga penegak hukum untuk melindungi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama ( <i>whistle blower</i> atau <i>justice collaborators</i> )	Laporan Pelaksanaan Peraturan Bersama lembaga penegak hukum untuk melindungi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama ( <i>whistle blower</i> atau <i>justice collaborators</i> )	Desember 2012	Peningkatan partisipasi pelapor dan saksi pelaku <i>whistle blower</i> yang bekerjasama untuk membantu penegakan hukum	Kejaksaan Agung	Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekjen KPK, LPSK, Sekjen Ombudsman RI

Penguatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
<b>Penguatan dan Konsistensi Sanksi Hukum dan Administrasi terhadap Penegak Hukum</b>							
87		Pelaksanaan penegakan hukum terkait pelanggaran yang dilakukan oleh aparat Kepolisian	<ul style="list-style-type: none"><li>- Laporan pelaksanaan penerapan sanksi bagi pejabat dan aparat yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik di Kepolisian</li><li>- Terpublikasinya kepada masyarakat atas pelaksanaan pengenaan sanksi hukum maupun administrasi kepada pejabat dan aparat yang telah melakukan pelanggaran</li></ul>	Desember 2012	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin dan kode etik serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum</li><li>- Menurunnya jumlah pejabat dan petugas bermasalah yang dipromosikan dan dimutasikan</li></ul>	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Komisi Kepolisian Nasional
88		Pelaksanaan penegakan hukum terkait pelanggaran yang dilakukan oleh aparat Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Laporan pelaksanaan penerapan sanksi bagi pejabat dan aparat yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik di Kejaksaan</li><li>- Terpublikasinya kepada masyarakat atas pelaksanaan pengenaan sanksi hukum maupun administrasi kepada pejabat dan aparat yang telah melakukan pelanggaran</li></ul>	Desember 2012	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin dan kode etik serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum</li><li>- Menurunnya jumlah pejabat dan petugas bermasalah yang dipromosikan dan dimutasikan</li></ul>	Kejaksaan Agung	Komisi Kejaksaan, Seljen Ombudsman RI

STRATEGI ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>STRATEGI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>							
<b>Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dalam Rangka Penegakan Hukum yang Modern dalam Sistem Peradilan Pidana</b>							
89		Penyusunan peraturan perundangan-undangan dalam rangka pemberantasan korupsi	Terlaksananya penguatan SPP Khusus Pemberantasan Korupsi dalam penyusunan RUU KUHAP Terlaksananya percepatan pengesahan RUU Tipikor sesuai Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dan RUU Perampasan aset	Desember 2012	Peningkatan kualitas penegakan hukum dan penanganan perkara korupsi	Kementerian Hukum dan HAM	Seljen KPK, Seljen Ombudsman RI
90		Penguatan peraturan perundangan dalam penanganan kasus korupsi di sektor publik dan sektor swasta	Tersedianya Peraturan BUMN tentang Akuntabilitas Keuangan BUMN Tersedianya Peraturan Pemerintah pelaksanaan UU KPK tentang Koordinasi dan Supervisi Tersedianya Peraturan Menteri BUMN tentang Penundaan Transaksi Bisnis yang terlibat korupsi	Desember 2012  Juni 2012	Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum dan terhadap transaksi bisnis nasional dan internasional	Kementerian BUMN Kementerian Hukum dan HAM Kementerian BUMN	
91		Pelaksanaan harmonisasi peraturan yang terkait dengan hukum acara dalam rangka penegakan hukum dan penanganan	Tersedianya peraturan terkait penanganan perkara dan penegakan hukum dalam sistem peradilan modern di Kepolisian	Agustus 2012	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penegakan hukum dan penanganan perkara dalam sistem peradilan yang modern	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kejaksaan Agung, Komisi Kepolisian Nasional

perkara ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		perkara dalam sistem peradilan di Kepolisian					
92		Penguatan dukungan lembaga peradilan dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka penegakan hukum yang modern dalam sistem peradilan pidana	Tersedianya produk hukum MA mengenai tugas dan fungsi lembaga peradilan dalam mendukung sistem peradilan pidana yang modern	September 2012	Peningkatan kualitas mekanisme dan koordinasi yang mendukung pelaksanaan koordinasi penegakan hukum diantara lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang modern	Sekretariat MA	POLRI, Kejaksaan
93		Pengaturan implementasi UU tentang Transfer Dana	Kajian bersama Menkeu-BI tentang pembatasan transaksi tunai	Desember 2012	Pembatasan transaksi tunai yang mempersempit peluang terjadinya tindak pidana korupsi	Kementerian Keuangan	BI

STRATEGI ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>STRATEGI KERJASAMA INTERNASIONAL DAN PENYELAMATAN ASET</b>							
<b>Memastikan Lembaga Pelaksana <i>Central of Authority</i> untuk Tipikor</b>							
94		Penguatan Pusat Pengendali pelaksanaan sesuai UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	Evaluasi dan database mengenai upaya-upaya kerjasama internasional (MLA) dan laporan keberhasilan kerjasama internasional yang pernah dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan tentang pusat pengendalian untuk kerjasama internasional pemberantasan korupsi	Desember 2012	Efektifitas peran <i>Central of Authority</i> dalam rangka kerjasama internasional dalam masalah pidana (MLA)	Kementerian Hukum dan HAM	Kemenko Polhukam, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Seljen KPK, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri
			Terbitnya peraturan tentang Pusat Pengendali Kerjasama Internasional Pemberantasan Korupsi	Desember 2012			
<b>Memastikan Pembentukan Lembaga Pengelolaan Aset Hasil Tipikor (AMU) dengan Tujuan untuk Mendukung Proses Penegakan Hukum, Proses Transparansi Pengelolaan Aset</b>							
95		Percepatan Penyusunan Perpres tentang Pembentukan lembaga Pengelola Aset	Penyusunan mekanisme pengembalian aset hasil tipikor berdasarkan kebutuhan dalam praktek pengembalian aset	Desember 2012	Efisiensi pengelolaan aset dan distribusi serta pemanfaatan hasil korupsi bagi penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi	Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Keuangan, Sekretariat Kabinet

Dukungan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
96		Dukungan lembaga peradilan dalam proses penyelamatan aset hasil korupsi	Tersedianya mekanisme/SOP penanganan penyelamatan aset hasil korupsi yang akuntabel dan transparan	Oktober 2012	Peningkatan percepatan proses penanganan perkara korupsi dan proses penyelamatan aset hasil korupsi	Sekretariat MA	Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekjen KPK, Kementerian Keuangan
<b>Pelatihan dan Bantuan Teknik dalam rangka Penyelamatan Aset Hasil Korupsi</b>							
97		Memantapkan koordinasi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan aparat terkait lainnya dalam rangka penyelamatan aset hasil korupsi ( <i>asset freezing, asset seizure, asset forfeiture, forensic accounting/audit forensik, mekanisme Mutual Legal Assistance</i> )	Terlaksananya koordinasi pelatihan berkala maupun <i>ad-hoc</i> di lingkungan aparat penegak hukum: a. Jumlah Pelatihan berkala di masing-masing K/L b. Jumlah pelatihan bersama antar penegak hukum terkait penyelamatan aset hasil korupsi	Desember 2012	Peningkatan pemahaman aparat penegak hukum dan aparat lembaga terkait lainnya dalam mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi	Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan	Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekjen KPK, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, PPATK

Pelatihan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
98		Pelatihan dan Bantuan Teknik dalam rangka penyelamatan aset hasil korupsi bagi hakim	Tersedianya sumber daya hakim yang memiliki kompetensi yang mendukung upaya penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi	Desember 2012	Peningkatan kapasitas hakim dalam proses penegakan hukum	Sekretariat MA	
<b>Pembentukan Task Force Penyelamatan Aset</b>							
99		Memantapkan koordinasi intensif antar lembaga yang memiliki kompetensi dalam mengembalikan aset hasil tipikor (baik di dalam negeri maupun luar negeri) guna menyusun strategi pengembalian aset	Terlaksananya koordinasi pengembalian aset hasil tipikor	Desember 2012	Peningkatan jumlah aset hasil tindak pidana korupsi yang berhasil diselamatkan	Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan	Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekretariat MA, Sekjen KPK

Penuntasan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
100		Penuntasan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dalam penyelamatan aset hasil tipikor	Laporan perkembangan capaian	Desember 2012	Peningkatan jumlah kasus dan nominal penyelamatan aset dari hasil tipikor	Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Luar Negeri, Kemenko Polhukam, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekretariat MA, Sekjen KPK
<b>STRATEGI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI</b>							
<b>Kampanye Anti Korupsi</b>							
101		Pelaksanaan sosialisasi kebijakan publik terkait upaya percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi di badan publik	Terlaksananya kegiatan sosialisasi mengenai kebijakan anti-korupsi, antara lain: <i>whistle blower system</i> , <i>justice collaborator</i> , dan kewajiban LHKPN melalui media komunikasi dan membangun tingkat kesadaran anti korupsi bagi badan publik, kalangan pengusaha, kelompok strategis masyarakat (mahasiswa, guru, LSM, dll)	Desember 2012	Meningkatnya kesadaran para penyelenggara di badan publik untuk menjalankan birokrasi yang bersih dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan badan publik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Sekjen KPK, Sekjen Ombudsman RI

Pelaksanaan ...





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 53 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
102		Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye massal budaya anti korupsi	Tersusunnya cetak biru strategi komunikasi pendidikan dan budaya anti korupsi	Juni 2012	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat luas mengenai nilai, budaya dan perilaku anti korupsi	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Sekjen KPK, Sekjen Ombudsman RI Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN dan RB
			Terlaksananya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat luas antara lain mengenai peran pencegahan dan pemberantasan korupsi, jenis perilaku koruptif, dan nilai-nilai anti korupsi lainnya	Desember 2012			
			Terlaksananya kampanye anti-korupsi melalui pengembangan produk kreatif (seni musik, seni pertunjukan dan perfilman) yang mendukung semangat anti-korupsi	Desember 2012	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat luas mengenai nilai, budaya dan perilaku anti korupsi	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			Terlaksananya kampanye pemuda anti-korupsi diantaranya melalui pramuka, paskibra dan kegiatan olahraga	Desember 2012		Kementerian Pemuda dan Olahraga	
<b>Pengembangan Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Berbagai Aktivitas di Sekolah dan Lingkup Sosial untuk Menciptakan Karakter Bangsa yang Berintegritas</b>							
103		Pengajaran anti-korupsi sebagai sisipan dalam kurikulum karakter bangsa pada pendidikan dasar dan menengah	Tersedianya modul ajar anti-korupsi yang siap disisipkan untuk pendidikan dasar dan menengah	April 2012	Pengintegrasian nilai anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Sekjen KPK, Sekjen Ombudsman RI

Persentase ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
			Persentase sosialisasi dan <i>training of trainers</i> modul anti-korupsi	Desember 2012			
			Jumlah uji coba penerapan modul anti-korupsi di sekolah dasar dan menengah	Desember 2012			
104		Pengembangan pendidikan anti-korupsi pada pendidikan tinggi	Tersedianya modul ajar anti-korupsi yang siap disisipkan untuk pendidikan tinggi	April 2012	Pengintegrasian nilai anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan tinggi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Sekjen KPK, Sekjen Ombudsman RI
			Persentase sosialisasi dan <i>training of trainers</i> modul anti-korupsi	Desember 2012			
			Jumlah uji coba penerapan modul anti-korupsi pada perguruan tinggi	Desember 2012			
<b>STRATEGI MEKANISME PELAPORAN</b>							
<b>Memperluas dan Mempermudah Akses Informasi Berbagai Upaya dalam rangka Proses Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dari Masing-masing K/L</b>							
105		Penyusunan laporan pelaksanaan implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (UNCAC)	Laporan implementasi UNCAC di Indonesia pada Konferensi Negara Pihak UNCAC	Setiap 2 (dua) tahun sekali (pelaksanaan CoSP)	Tersusunnya laporan pencegahan dan pemberantasan korupsi nasional sebagai bentuk pelaporan pemerintah dalam mengimplementasikan UNCAC	Kementerian Luar Negeri, Sekjen KPK	Kementerian PAN dan RB, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM,

Kementerian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
							Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, PPATK, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Ombudsman RI
106		Penyusunan laporan tahunan terintegrasi mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi	Laporan tahunan Pencegahan dan pemberantasan korupsi kepada Presiden	Desember 2012	Peningkatan kualitas laporan Pencegahan dan pemberantasan korupsi secara nasional	Sekjen KPK	Kementerian PAN dan RB, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri,

Kementerian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

No	Isu/ Strategi Nasional	Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
							Kementerian Dalam Negeri, PPATK, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekjen Ombudsman RI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan,  
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

